

Implementasi Tindakan Pengawasan Atas Kepatuhan Proses Keimigrasian Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Fibiya Harnung Diastuti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Tindakan Pengawasan Atas Kepatuhan Proses Keimigrasian Izin Tinggal Terbatas Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Secara khusus fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum serta prosedur pengaturan pemberian dan pengawasan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Tenaga Kerja Asing (TKA), mengetahui implementasi pengawasan ITAS TKA terhadap prosedur keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, serta untuk mengetahui kendala dan upaya pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan prosedur keimigrasian terhadap TKA di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum untuk tugas akhir ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan jenis metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat atau penelitian ini dilakukan terhadap situasi kondisi masyarakat sebenarnya dengan tujuan menemukan fakta-fakta empiris yang bersumber dari perilaku manusia, baik melalui wawancara maupun perilaku nyata yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, pengaturan pemberian dan pengawasan ITAS TKA, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan perundang-undangan lainnya yang mengatur izin tinggal terbatas keimigrasian. Secara dalam peraturan tersebut, berdasarkan prosedur keimigrasian terhadap TKA penggunaan ITAS, kepemilikan data pribadi yang sah dan sponsor yang menjamin TKA selama tinggal wajib dilengkapi dan di setujui oleh pihak keimigrasian. *Kedua*, implementasi tindakan pengawasan ITAS TKA terhadap prosedur keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dalam pengawasan pada TKA belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta masih ditemukan pengawasan yang tidak maksimal terhadap TKA yang menggunakan ITAS. *Ketiga*, Kendala dan upaya pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan prosedur keimigrasian terhadap TKA di Kantor Imigrasi kelas I TPI Semarang, yaitu baik segi kendala sulit melacak keberadaan TKA baik secara instansi perusahaan tempat TKA bekerja mempersulit untuk diawasi oleh pihak imigrasi; terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pejabat imigrasi sebagai tim pengawas, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi pusat dan daerah; dan belum maksimalnya pengawasan TKA di Kota Semarang oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) melalui penegakan hukum serta pemberian sanksi administratif bagi perusahaan yang

melakukan pelanggaran, penyidikan, dan deportasi terhadap TKA yang illegal. Secara upaya yang telah dilakukan, yaitu melakukan upaya preventif dengan memaksimalkan, melakukan koordinasi dan memperluas jangkauan pengawasan Tim Pora terhadap TKA; melakukan upaya represif terhadap pelanggaran yang dilakukan TKA dengan penyelidikan, penangkapan, dan pemberian sanksi atas pelanggaran; melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap perusahaan tempat TKA bekerja; serta edukasi penggunaan ITAS terhadap TKA.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Izin Tinggal Terbatas, Keimigrasian, Pengawasan

Abstract

This research aims to find out the implementation of the Implementation of Surveillance Actions on Compliance of Immigration Processes with Restricted Residence Permit by the Immigration Office of Class I TPI Semarang. Specifically, the focus of this research is to know the legal basis as well as the procedures for setting up the issuance and surveillance of the Restriction Permit (ITAS) of the Foreign Labour Force (TKA), knowing the application of ITAS TKA supervision on immigration procedures by the immigration office of the Class I of the TPI Semarang, and to know obstacles and monitoring efforts in improving the compliance of immigration procedure against the TKA in the I-Class of the IMI.

Empirical jurisprudence is a type of method of legal research that studies the provisions of the law that apply in a society or this research is carried out on the situation of the real conditions of a society with the aim of finding empirical facts that originate from human behavior, both through interviews and real behaviors that ultimately lead to the solution of problems.

The results of the research show that First, the legal basis and procedures for regulating the granting and supervision of ITAS TKA, namely the Act No. 6 of 2011 on Immigration; Government Regulation No. 31 of 2013 on the Enforcement of the Law No.6 of 2011 On Immigration (State Gazette of the Republic of Indonesia No. 68 of 2011, Supplementary State Gazette No. 5409), Government Regulations No. 27 of 2014 on the Technical Procedures for the Granting, Extension of Refusal, Cancellation and Expiration of Residence Permits for Visitors, Restricted Residence and Permanent Residence as well as Exemptions from the Permission of Stay; Government Ordinance No. 32 of 1994 on Visa, Permission, Entry and Immigration Permission; and Possession of Residency Permit; and the Ministry of Legal Affairs and Human Rights Regulations Number 22 of 2023 on Stay Permission. Third, the difficulties in monitoring the presence of TKA in both the agencies in which TKA works make it difficult for him to be immigrated by the immigration authorities. The limited human resources (MSD) of immigration officials are the places where they illegally carry out sanctions, as well as the use of maximum restrictions against the people, the TKA has not yet coordinated its efforts in the area of prosecution and detention and the coordination of the TAS with the administrative and oversight efforts of the PKA; the restricted human resources of the immigrant authorities are the areas where the sanctions are carried out and the maximum sanctions have been applied to the persons against whom PKA has done, and the efforts to coordinate the efforts of PKA in the areas of detention, repression and deportation;

Keywords: *foreign labour, restricted residence permit, immigration, surveillance*